



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III - PENINGKATAN EKOSISTEM  
INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA**

**TANGGAL 15 JULI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 15 Juli 2020
P u k u l	: 11.02 WIB s/d 17.54 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 13 s.d. Pasal 16
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 26 orang dan secara virtual 6 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 20 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 8 Orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 13 s.d. Pasal 16 dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 11.02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU tersebut.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

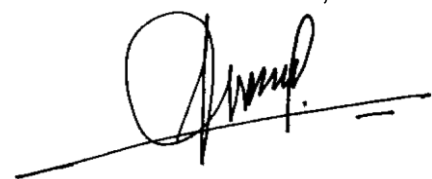
Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 13 s.d. Pasal 16, menyepakati/menyetujui:

1. Pemerintah memberikan jaminan terkait dengan masukan/usulan materi muatan dari fraksi-fraksi yang telah disetujui untuk masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan disusun.
2. DIM 202, disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja dan jaminan dari Pemerintah bahwa materi muatan yang diusulkan oleh fraksi masuk dalam materi muatan Peraturan Pemerintah (PP).
3. DIM 203, disetujui usulan penambahan kata “ pemanfaatan” sebelum kata “lahan” dari FPDJ Perjuangan sehingga judul Bagian Ketiga menjadi “Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan, dan Pemanfaatan Lahan”
4. DIM 206 s.d. DIM 208, dan DIM 210 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
5. DIM 211, disetujui untuk substansi terkait bentuk digital dan akses dipecah menjadi 2 ayat.
6. DIM 212, disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja
7. DIM 213, disetujui dengan titik koordinat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).
8. DIM 214, disetujui perbaikan rumusan dari Pemerintah menjadi “Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha”.
9. DIM 215 s.d DIM 217 dan DIM 219 s.d. DIM 222 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU tentang Cipta Kerja.
10. DIM 223, disetujui untuk dihapus

## III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha terkait materi Pasal 13 s.d. Pasal 16 ditutup pukul 17.54 WIB dan rapat selanjutnya dijadwalkan pada Masa Reses IV Tahun Sidang 2019-2020.

Jakarta, 15 Juli 2020  
A.N. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP.19670127 199803 1 001